Kajian Ekonomi & Keuangan
http://fiskal.depkeu.go.id/ejournal

Pengaruh Sektor Keuangan Bank Perkreditan Rakyat terhadap Perekonomian Regional Wilayah Sulawesi

Yesi Hendriani Supartoyo[α*], Bambang Juanda[β], Muhammad Firdaus[β] & Jaenal Effendi[β]

* Email: yesisupartoyo77@gmail.com
[α] Prodi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 16680
[β] Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 16680

Riwayat artikel:
- Diterima 16 Maret 2017
- Direvisi 30 Januari 2018
- Disetujui 12 Februari 2018
- Tersedia online 23 April 2018

Kata kunci: Analisis Regresi Komponen Utama; Bank Perkreditan Rakyat; Perekonomian Regional; Sektor Keuangan

JEL Classification : C38; R51; R11; G21

Abstract

The financial sector can affect regional economic growth. This research aims to analyze the effect of the financial sector from Rural Bank on the Regional Economy in Sulawesi. Analysis method used is Principal Component Analysis. Financial sector of the Rural Bank consisting of the financial sector variables such as Rural Bank assets, the amount of credit from Rural Bank, Third Party Funds and the number of Rural Bank. Financial sector variables have an effect to regional economic growth in Sulawesi positively and significantly. The number of Rural Bank has the most significant impact on regional economic improvements in Sulawesi. Therefore, as input of suggestion or recommendation, local government, monetary policy and Financial Service Authority in its implementation need to work together with ministries, banks, and domestic institutions to improve the financial sector roles of Rural Bank related to capital formation and credits distribution of Rural Bank credits that impact regional development in Sulawesi.

Abstrak

Sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional dan memegang peranan penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh sektor keuangan dari Badan Perkreditan Rakyat terhadap Perekonomian Regional di wilayah Sulawesi. Metode analisis yang digunakan ialah Analisis Regresi Komponen Utama. Diperoleh hasil bahwa perkembangan sektor keuangan dari Bank Perkreditan Rakyat terhadap perekonomian regional di wilayah Sulawesi yang terdiri dari variabel sektor keuangan yaitu aset BPR, jumlah kredit yang disalurkan oleh BPR, Dana Pihak Ketiga BPR dan jumlah BPR berbadan hukum masing-masing mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi regional di wilayah Sulawesi secara positif dan signifikan. Jumlah BPR berbadan hukum memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap peningkatan perekonomian regional di wilayah Sulawesi. Oleh karenanya sebagai masukan saran atau rekomendasi maka Pemerintah daerah, otoritas moneter dan OJK dalam pelaksanaannya perlu bersinergi dengan kementerian, perbankan, lembaga domestik guna meningkatkan peran sektor keuangan dari BPR diantaranya berkaitan dengan pembentukan akumulasi modal fisik dan pemeratan persebaran kredit BPR yang berdampak terhadap pembangunan kewilayahan di wilayah Sulawesi.

©2017 Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI

1. PENDAHULUAN

Sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional dan memegang peranan penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Masing-masing fungsi sistem keuangan tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui dua jalur, yaitu jalur akumulasi modal (modal fisik dan modal manusia) dan jalur inovasi teknologi. Kedua jalur tersebut merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkembang di dalam literatur teori pertumbuhan ekonomi.

Sistem keuangan mempengaruhi kedua sumber pertumbuhan dengan cara mempengaruhi tingkat tabungan (sisi penawaran dana) dan dengan merealokasikan tabungan ke dalam berbagai alternatif investasi (sisi permintaan dana), baik investasi modal fisik, investasi sumber daya manusia, maupun investasi teknologi. Semakin baik sistem keuangan dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya maka akan semakin besar pula kontribusi sistem keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Tanpa akses pada berbagai sumber dana (investor), banyak kegiatan usaha yang hanya mampu berproduksi dalam volume relatif kecil sehingga tidak efisien.

Berdasarkan Kajian Ekonomi Regional, maka perekonomian wilayah Sulawesi dapat dirinci berdasarkan perkembangan makroekonomi regional (ekonomi makro daerah) dan sistem keuangannya yaitu sebagai berikut, diantaranya Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara pada triwulan III November 2016 tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan II 2016. Ekonomi tumbuh sebesar 6,01 persen (yoy), lebih rendah dari triwulan II 2016 sebesar 6,14 persen (yoy). Kondisi stabilitas keuangan daerah di Sulawesi Utara pada triwulan III 2016 relatif masih terjaga. Sementara itu, perlambatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) masih terus berlanjut pada periode laporan hingga mencatat pertumbuhan negatif. Dari sisi penyaluran pembiayaan, kredit tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan triwulan III 2016 tumbuh 6,82 persen (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan II 2016 yang tercatat 8,04 persen (yoy). Pertumbuhan ekonomi yang melambat diikuti dengan kinerja stabilitas keuangan yang turun. Kinerja perbankan scara umum tercatat masih baik. Meskipun terjadi sedikit perlambatan pertumbuhan aset dan kredit, namun kinerja intermediasi masih sangat baik dengan mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi di triwulan III 2016. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan penurunan.

Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan III 2016 tumbuh 7,58 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 15,52 persen (yoy). Kinerja perbankan di Sulawesi Tengah pada triwulan laporan tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Meskipun mengalami perlambatan, namun peran intermediasi perbankan relatif berada dalam koridor positif dalam mendukung sektor riil di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi domestik maupun global dengan LDR mencapai 141 persen. Pertumbuhan kredit berdasarkan jenis penggunaan masih berada dalam tren melambat.

Pertumbuhan Sulawesi Tenggara pada triwulan III 2016 tumbuh sebesar 6,0 persen (yoy), mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh sebesar 6,8 persen (yoy). Stabilitas keuangan dan risiko kredit yang masih terjaga berdampak minimal pada sistem keuangan. Perekonomian yang melambat mempengaruhi kinerja institusi keuangan khususnya perbankan. Kinerja penghimpunan DPK dan penyaluran kredit mengalami perlambatan. Sementara itu, risiko kredit menunjukkan peningkatan meskipun masih dalam batas terkendali.

Perekonomian Provinsi Gorontalo pada triwulan III 2016 tumbuh sebesar 6,98 persen (yoy) tercatat mengalami akselerasi jika dibandingkan dengan triwulan II 2016 yang tumbuh sebesar 5,40 persen (yoy). Pada triwulan III 2016, risiko kerentanan sektor korporasi mengalami peningkatan seiring perlambatan pertumbuhan kredit Gorontalo.

Perekonomian Provinsi Sulawesi Barat pada triwulan III 2016 mencapai Rp 7,01 triliun atau tumbuh sebesar 5,97 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2015. Pertumbuhan secara tahunan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya mampu tumbuh 4,80 persen (yoy).

Strategi dan peran pemerintah dalam perekonomian regional diantaranya ialah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatur penyediaan barang publik (alokasi), mengurangi inflasi dan pengangguran (stabilisasi), serta melaksanakan pemerataan (keadilan sosial) atau distribusi. Peran tersebut diantaranya dilakukan melalui sektor riil (sektor barang) dan sektor moneter (sektor keuangan).

Peran sektor moneter dapat dipahami melalui industri perbankan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana masyakarat ke dalam investasi aset produktif yang akan mendorong produktivitas sektor riil, akumulasi kapital, dan pertumbuhan output agregat.

Kredit dari sisi pengguna dianggap sangat penting, sebab umumnya pengusaha mengalami hambatan permodalan untuk melakukan investasi baru atau dalam melakukan perubahan teknologi. Kredit tidak hanya penting dalam pengertian untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), melainkan juga diperuntukkan bagi pengusaha yang memiliki keterbatasan keuangan dan keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, menjadi hal yang mendesak bagi lembaga keuangan untuk menggarap usaha mikro dan kecil secara lebih serius agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Teori keuangan mikro menjelaskan bahwa tingginya kredit UMKM akan meningkatkan akses finansial yang kemudian akan mendorong kemampuan UMKM melakukan ekspansi usaha. Dalam kaitan ini maka peranan kredit terhadap perekonomian menjadi penting terutama dari aspek makro terhadap pertumbuhan ekonomi maupun aspek mikro pada usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi regional dan alokasi kredit, terdapat indikasi bahwa kredit berperan sebagai stimulator pertumbuhan ekonomi. Peran kredit sangat penting untuk mendorong peran sektor riil sebagai turunan dari kebijakan fiskal dan moneter yang mampu mendorong akselerasi perekonomian wilayah di sektor riil. Berkenaan dengan hal tersebut maka di bidang kelembagaan dan daya saing sektor keuangan khususnya pengawasan dan pengembangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada pertengahan November 2014 telah meluncurkan beberapa peraturan OJK (POJK) di bidang perbankan seiring dengan perkembangan sektor keuangan yang semakin cepat diantaranya POJK No. 20/POJK.03/2014 tentang Badan Perkreditan Rakyat (BPR).

Aturan ini menetapkan beberapa aspek terkait pendirian dan operasional BPR. Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan industri perbankan di dalam negeri masih menunjukkan perkembangan yang cukup mantap namun ditandai oleh penurunan pertumbuhan kredit yang cukup signifikan pada tahun 2014 – 2015. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sektor keuangan dari Bank Perkreditan Rakyat terhadap perekonomian regional terutamanya yang berada di wilayah Sulawesi yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam kaitannya dengan perekonomian wilayah, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan pula kenaikan nilai riil output agregat. Tujuan dari pengamatan terhadap angka pertumbuhan ekonomi antara lain untuk mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah dan memperkirakan dampaknya terhadap kesempatan kerja, tingkat inflasi dan lainnya.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi antara lain oleh investasi swasta, konsumsi swasta, pengeluaran pemerintah. Sedangkan dari sisi penawaran, terdapat empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam dan tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno 2006). Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi di suatu wilayah atau Negara lebih tinggi dari apa yang dicapai pada periode sebelumnya. Menurut Boediono (1996) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan produksi (*output*) per kapita dalam jangka panjang.

Disparitas pembangunan merupakan masalah regional yang tidak merata. Pendekatan pembangunan yang sangat menekankan pada pertumbuhan ekonomi makro cenderung akan mengakibatkan terjadinya

kesenjangan pembangunan antar wilayah yang cukup besar. Keseimbangan antar kawasan menjadi penting karena keterkaitan yang bersifat simetris akan mampu mengurangi disparitas antar wilayah dan mampu memperkuat pembangunan ekonomi wilayah secara menyeluruh. Dalam perspektif paradigma keterkaitan antar wilayah, kemiskinan di suatu tempat akan sangat berbahaya bagi wilayah lainnya (Rustiadi *et al* 2011)

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya disparitas antar wilayah diantaranya ialah ekonomi. Faktor-faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya disparitas adalah: 1) Faktor ekonomi yang terkait dengan perbedaan kuantitas dan kualitas dari faktor produksi yang dimiliki, 2) Faktor ekonomi yang terkait dengan akumulasi dari berbagai faktor yang salah satunya adalah lingkaran setan kemiskinan, 3) Faktor ekonomi yang terkait dengan pasar bebas dan pengaruhnya terhadap *spread effect* dan *backwash effect*, serta 4) Faktor ekonomi yang berkaitan dengan distorsi pasar.

Untuk membangun keterkaitan antar wilayah dan mengurangi terjadinya disparitas antar wilayah, maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain (Rustiadi *et al* 2011): Mendorong pemerataan tabungan. Tabungan sangat diperlukan untuk bisa memacu investasi. Apabila jumlah tabungan di suatu wilayah meningkat maka potensi investasi juga akan meningkat; dan mendorong pemerataan investasi. Investasi harus terjadi pada semua sektor dan wilayah secara simultan sehingga infrastruktur bisa berkembang.

Faktor sosial ekonomi dapat memiliki efek positif atau negatif yang berantai terhadap disparitas antar wilayah. Faktor sosial seperti tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang rendah, selanjutnya akan menyebabkan tingkat produksi yang rendah, akibatnya pendapatan yang menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat pun juga rendah dan ini akan menjadi lingkaran setan yang membuat suatu wilayah makin terbelakang.

Berdasarkan aspek ekonomi, pengertian wilayah adalah ekonomi ruang suatu daerah administratif yang berada di bawah administrasi pemerintahan tertentu seperti provinsi dan kabupaten. Jadi, pengertian wilayah didasarkan pada pembagian administratif suatu Negara. Pengertian ini paling banyak digunakan dalam perencanaan pembangunan ekonomi wilayah karena daerah yang batasannya ditentukan secara wilayah administratif lebih mudah dianalisis. Salah satu keunggulan dari wilayah atas dasar administrasi pemerintahan adalah dapat ditetapkannya batas wilayah secara jelas (Arsyad 1999; Tarigan 2003)

Pertumbuhan ekonomi wilayah pada dasarnya terkait dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pertumbuhan ini menyangkut perkembangan ekonomi berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi (*output*) dan pendapatan. Perekonomian mengalami pertumbuhan jika jumlah barang dan jasa yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya.

Pembangunan ekonomi wilayah (daerah) adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut (Arsyad 1999)

Konsep yang paling sering digunakan untuk menggambarkan pendapatan wilayah di suatu daerah administrasi adalah PDRB yaitu nilai tambah bruto dari seluruh sektor perekonomian yang ada di suatu daerah administrasi tersebut. Terdapat dua kemungkinan hubungan kausalitas antara pembangunan sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi, yaitu: *Pertama*, *Demand-following*, bahwa rendahnya pertumbuhan sektor keuangan adalah manifestasi kurangnya permintaan akan jasa finansial. *Kedua*, *Supply-leading*, bahwa sektor keuangan mendahului dan mendorong pertumbuhan sektor riil.

Demand-following adalah fenomena ketika pembentukan institusi finansial modern, aset dan liabilitas, dan berbagai jasa keuangan adalah sebagai respon dari meningkatnya permintaan jasa keuangan oleh para investor dan penabung dalam sektor riil. Pada saat perekonomian riil tumbuh maka permintaan akan jasa keuangan juga akan bertambah, dengan semakin banyaknya jasa keuangan yang digunakan maka perkembangan sektor keuangan juga akan menjadi positif.

Supply-leading hypothesis berarti bahwa pembangunan institusi dan pasar keuangan akan meningkatkan penawaran jasa keuangan (terutama permintaan jasa oleh para pengusaha dan investor) yang akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi riil. *Supply-leading* mempunyai dua fungsi, yaitu untuk mentransfer sumberdaya dari sektor tradisional menuju sektor industri, dan untuk mendorong respon para pengusaha dalam sektor industri. Lembaga intermediasi yang mentransfer sumberdaya dari sektor tradisional (melalui peningkatan kesejahteraan dan tabungan dari sektor ini untuk dijadikan deposito atau dengan penciptaan kredit) sesuai dengan konsep Schumpeter tentang inovasi keuangan (Maski 2010).

Teori neoklasik selalu mengarahkan kepada pasar persaingan sempurna agar perekonomian bisa tumbuh optimal. Kebijakan yang ditempuh adalah meniadakan berbagai hambatan dalam perdagangan, perpindahan orang, barang dan modal. Sarana dan prasarana transportasi dibangun dengan baik dan terjaminnya keamanan, ketertiban dan kestabilan politik (Tarigan 2006)

Pada beberapa literatur disebutkan istilah kredit berasal dari bahasa Latin *credo* atau *credere* yang berarti kepercayaan atau *trust*. Kredit mengandung pengertian yaitu adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan)

Adapun jenis-jenis kredit menurut tujuan penggunaannya terdiri dari: *Kredit konsumtif* yaitu kredit untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan individu; dan *Kredit produktif* yaitu kredit untuk tujuan produktif dalam arti dapat meningkatkan kegunaan. Kredit produktif terdiri dari: Kredit investasi untuk membiayai pembelian barang modal tetap, umumnya berjangka waktu menengah dan panjang; dan Kredit modal kerja untuk membiayai modal lancar bagi proses produksi, umumnya berjangka waktu pendek atau menengah.

Kredit dalam perekonomian memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi. Kredit produktif mendorong pertumbuhan ekonomi karena kredit ini ditujukan untuk pendirian, modernisasi, rehabilitasi dan ekspansi usaha. Kaitannya dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter yang dapat didefinisikan sebagai jalur yang dilalui oleh sebuah kebijakan moneter untuk mempengaruhi kondisi perekonomian, terutama pendapatan nasional. Mekanisme transmisi kebijakan moneter terkait dengan bagaimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi pendapatan nominal dan kegiatan sektor riil secara keseluruhan.

Dalam literatur ekonomi moneter, kajian mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter umumnya mengacu pada peranan uang dalam perekonomian yang pertama kali dijelaskan oleh *Quantity Theory of Money* atau Teori Kuantitas Uang klasik persamaan Irving Fisher yang merupakan titik tolak pengembangan teori kuantitas yang menggambarkan kerangka kerja yang jelas mengenai analisis hubungan langsung yang sistematis antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan inflasi yang dinyatakan dalam suatu identitas *The Equation of Exchange*:

$$MV = PT$$

dimana jumlah uang beredar (M) dikalikan dengan tingkat perputaran uang (V) sama dengan jumlah output atau transaksi ekonomi riil (T) dikalikan dengan tingkat harga (P). Dengan kata lain, dalam keseimbangan jumlah uang beredar yang digunakan dalam seluruh kegiatan transaksi ekonomi (MV) sama dengan jumlah output yang dihitung dengan harga berlaku (PT).

Pada Teori Kuantitas Uang dalam pandangan klasik, uang hanya digunakan sebagai alat pertukaran dan pengukur nilai, sehingga uang bersifat netral dan tidak mempengaruhi sektor riil. Satu-satunya variabel yang terpengaruhi hanyalah tingkat harga umum. Dalam teori klasik, jumlah uang yang beredar akan menentukan posisi dari fungsi permintaan agregat.

Aliran Monetarisme adalah suatu aliran yang percaya bahwa jumlah uang beredar merupakan penyebab utama fluktuasi ekonomi (*output* dan kesempatan kerja) terutama dalam jangka pendek, dan pertumbuhan jumlah uang beredar yang stabil akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang stabil pula. Sedangkan aliran Keynesian adalah suatu aliran yang percaya bahwa upah dan harga tidak dapat menyesuaikan untuk mencapai

kesempatan kerja penuh, dan permintaan agregat menentukan fluktuasi *output*, serta kebijakan fiskal dapat efektif mengendalikan permintaan agregat. Jadi aliran ini lebih menekankan kebijakan fiskal dari pada moneter untuk mengatasi resesi (Juanda 2010)

Bank memiliki peranan khusus dalam sistem keuangan karena mampu mengatasi masalah informasi asimetris di pasar kredit. Sepanjang tidak ada substitusi yang sempurna dari simpanan bank ritel dengan sumber pendanaan lainnya. Kebijakan moneter ekspansioner meningkatkan cadangan bank dan simpanan bank yang berakibat pada meningkatnya ketersediaan kredit bank. Kenaikan kredit ini akan menyebabkan pengeluaran investasi meningkat dan pada akhirnya mampu meningkatkan *output*.

Transmisi kebijakan moneter ke sektor riil melalui jalur kredit *(bank lending channel)* dapat digunakan untuk melihat pengaruh kebijakan moneter dalam menggerakkan penawaran kredit (Haryanto 2007). Generasi pertama dari model pinjaman perbankan berawal dari aksioma Modigliani-Miller dengan dasar informasi asimetrik antara peminjam dan pemberi pinjaman tentang karakteristik yang disepakati. Asumsinya pengusaha memiliki informasi pribadi tentang bisnisnya, yang memiliki tingkat pengembalian yang sama tetapi dengan tingkat keberhasilan yang berbeda. Faktor penting dari jalur pinjaman bank ini adalah bank sentral dapat mempengaruhi penawaran kredit yang diberikan oleh lembaga intermediasi keuangan dengan membatasi kuantitas uang, dan peningkatan biaya modal bagi bank tergantung pada peminjam. Jalur kredit akan mempengaruhi kondisi ekonomi dengan mengarahkan pada variasi dalam biaya modal perusahaan dan kesehatan keuangan perusahaan.

3. METODE PENELITIAN

Pemikiran Keynesian menjelaskan tentang peranan investasi di dalam meningkatkan *output* yaitu dengan adanya hubungan antara perubahan ouput (ΔY) sebagai akibat dari perubahan investasi (ΔI) dikalikan dengan angka pengganda (m) dengan formula:

$$\Delta Y = m.\ \Delta I$$

Dengan formula tersebut Harrod dan Domar menurunkan rumus lebih lanjut bahwa perekonomian bisa tumbuh tergantung dari jumlah tabungan dan efisiensi penggunaan kapital. Semakin tinggi bagian pendapatan yang ditabung (s) dan semakin rendah k, dimana k adalah K/Y, maka perkonomian bisa tumbuh dengan cepat:

$$\Delta Y/Y = s/k$$

ΔY/Y disebut dengan pertumbuhan ekonomi, sedangkan k disebut juga *Capital Ouput Ratio (COR)*, yang menunjukkan efisiensi kapital di dalam memproduksi ouput. Semakin rendah k semakin baik.

Model yang dikenal sebagai model Solow-Swan ini menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, akumulasi kapital dan besarnya output yang saling berinteraksi. Model ini menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan terjadinya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Sumber pertumbuhan berasal dari akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja dan kemajuan teknologi. Teknologi terlihat dari peningkatan *skill* dan dianggap fungsi dari waktu (Tarigan 2006).

Model ini melihat bahwa mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga campur tangan pemerintah cukup sebatas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Karena itu fungsi produksinya adalah:

$$Y_i = f_i(K,L,t)$$

Dalam kerangka ekonomi wilayah, Richardson merumuskan menjadi:

$$Y_i = a_i k_i + (1 - a_i) n_i + T$$

Dimana:

Y_i = besarnya output
k_i = tingkat pertumbuhan modal
n_i = tingkat pertumbuhan tenaga kerja

T = kemajuan teknologi
a_i = bagian yang dihasilkan dari faktor model
$(1-a_i)$ = bagian yang dihasilkan dari faktor di luar model

Agar faktor produksi selalu berada pada kapasitas penuh (*full employment*) perlu mekanisme yang menyamakan investasi (I) dengan tabungan (S). Sehingga pertumbuhan mantap (*steady growth*) membutuhkan syarat:

$$MPK_i = a_i(Y_i K_i/) = p$$

MPK_i adalah *Marginal Productivity of Capital*. Apabila p sudah tertentu dan a_i tetap konstan, maka Y_i (pertumbuhan pendapatan) dan K_i (pertumbuhan modal) harus tumbuh dengan tingkat yang sama. Syarat keseimbangan seluruh sistem adalah:

$$\Sigma I_{ii=1} = \Sigma S_{ii=1}$$

Suatu wilayah akan mengimpor modal jika tingkat pertumbuhan modalnya lebih kecil dari rasio tabungan domestik terhadap modal. Dalam pasar persaingan sempurna MPL (*Marginal Productivity of Labor*) adalah merupakan fungsi langsung tetapi memiliki hubungan terbalik dengan MPK (*Marginal Productivity of Capital*). Hal ini bisa dilihat dari rasio modal dan tenaga kerja (K/L).

Penelitian ini menggunakan Analisis Komponen Utama (*Principal Component Analysis*) yaitu merupakan analisis *multivariate* yang mentransformasi variabel-variabel asal yang saling berkorelasi menjadi variabel-variabel baru yang tidak saling berkorelasi dengan mereduksi sejumlah variabel tersebut sehingga mempunyai dimensi yang lebih kecil namun dapat menerangkan sebagian besar keragaman variabel aslinya.

Banyaknya komponen utama yang terbentuk sama dengan banyaknya variabel asli. Pereduksian (penyederhanaan) dimensi dilakukan dengan kriteria persentase keragaman data yang diterangkan oleh beberapa komponen utama pertama. Apabila beberapa komponen utama pertama telah menerangkan lebih dari 75 persen keragaman data asli, maka analisis cukup dilakukan sampai dengan komponen utama tersebut.

Bila komponen utama diturunkan dari populasi multivariat normal dengan random vektor $\mathbf{X} = (X1, X2, \ldots, Xp)$ dan vektor rata-rata $\mu = (\mu 1, \mu 2, \ldots, \mu p)$ dan matriks kovarians $\mathbf{\Sigma}$ dengan akar ciri (*eigenvalue*) yaitu $\lambda 1 \geq \lambda 2 \geq \cdots \geq \lambda p \geq 0$ didapat kombinasi linier komponen utama yaitu sebagai berikut.

$$\begin{aligned} Y_1 &= e'_1 X = e'_{11} X_1 + e'_{21} X_2 + \cdots + e'_{p1} X_p \\ Y_2 &= e'_2 X = e'_{12} X_1 + e'_{22} X_2 + \cdots + e'_{p2} X_p \\ &\vdots \\ Y_p &= e'_p X = e'_{1p} X_1 + e'_{2p} X_p + \cdots + e'_{pp} X_p \end{aligned}$$

Maka $Var(Yi) = ei'\Sigma ei$ dan $Cov(Yi, Yk) = ei'\Sigma ei$ dimana $i,k = 1, 2, \ldots, p$. Syarat untuk membentuk komponen utama yang merupakan kombinasi linear dari variabel **X** agar mempunyai varian maksimum adalah dengan memilih vektor ciri (*eigen vector*) yaitu $e = (e1, e2, \ldots, ep)$ sedemikian hingga $Var(Yi) = ei'\Sigma ei$ maksimum dan $ei'ei = 1$.

1. Komponen utama pertama adalah kombinasi linear $e1'X$ yang memaksimumkan $Var(e1'X)$ dengan syarat $e1'e1 = 1$.
2. Komponen utama kedua adalah kombinasi linear $e2'X$ yang memaksimumkan $Var(e2'X)$ dengan syarat $e2'e2 = 1$.
3. Komponen utama ke-i adalah kombinasi linear $ei'X$ yang memaksimumkan $Var(ei'X)$ dengan syarat $ei'ek = 1$ dan $Cov(ei'ek)=0$ untuk $k < 1$.

Antar komponen utama tersebut tidak berkorelasi dan mempunyai variasi yang sama dengan akar ciri dari **Σ**. Akar ciri dari matriks ragam peragam **Σ** merupakan varian dari komponen utama **Y**, sehingga matriks ragam peragam dari **Y** adalah:

$$\mathbf{\Sigma} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_p \end{bmatrix}$$

Total keragaman variabel asal akan sama dengan total keragaman yang diterangkan oleh komponen utama yaitu:

$$\sum_{J=1}^{P} \mathrm{var}(X_i) = \mathrm{tr}(\Sigma) = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_p = \sum_{J=1}^{P} \mathrm{var}(Y_i)$$

Penyusutan dimensi dari variabel asal dilakukan dengan mengambil sejumlah kecil komponen yang mampu menerangkan bagian terbesar keragaman data. Apabila komponen utama yang diambil sebanyak *q* komponen, dimana $q < p$, maka proporsi dari keragaman total yang bisa diterangkan oleh komponen utama ke-*i* adalah:

$$\frac{\lambda_i}{\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_p} \qquad i = 1, 2, \ldots, p$$

Penurunan komponen utama dari matriks korelasi dilakukan apabila data sudah terlebih dahulu ditransformasikan ke dalam bentuk baku Z. Transformasi ini dilakukan terhadap data yang satuan pengamatannya tidak sama. Bila variabel yang diamati ukurannya pada skala dengan perbedaan yang sangat lebar atau satuan ukurannya tidak sama, maka variabel tersebut perlu dibakukan (*standardized*). Variabel baku (Z) diperoleh dari transformasi terhadap variabel asal dalam matriks berikut:

$$\mathbf{Z} = \left(\mathbf{V}^{1/2}\right)^{-1} (\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})$$

$\mathbf{V}^{1/2}$ adalah matriks simpangan baku dengan unsur diagonal utama adalah $(\alpha ii)^{1/2}$ sedangkan unsur lainnya adalah nol. Nilai harapan E(Z) = 0 dan keragamannya adalah:

$$\mathrm{Cov}(\mathbf{Z}) = \left(\mathbf{V}^{1/2}\right)^{-1} \Sigma \left(\mathbf{V}^{1/2}\right)^{-1} = \rho$$

Dengan demikian komponen utama dari Z dapat ditentukan dari vektor ciri yang diperoleh melalui matriks korelasi variabel asal ρ. Untuk mencari akar ciri dan menentukan vektor pembobotnya sama seperti pada matriks **Σ**. Sementara *trace* matriks korelasi ρ akan sama dengan jumlah *p* variabel yang dipakai. Pemilihan komponen utama yang digunakan didasarkan pada nilai akar cirinya, yaitu komponen utama akan digunakan jika akar cirinya lebih besar dari satu.

Data yang digunakan meliputi PDRB, aset BPR, DPK dan kredit yang disalurkan BPR pada masing-masing provinsi dan jumlah BPR di wilayah Sulawesi. Software yang digunakan ialah Minitab 16. Model ekonometri yang dipergunakan ialah model yang dirumuskan oleh Levine (1997) yaitu:

$$Growth_i = \beta_0 + \beta_1(Finance)_i + \beta_2(Conditioning\ set)_i + e_t$$

Sehingga bentuk model yang akan digunakan adalah :

$$PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1(Aset)_{it} + \beta_2(DPK)_{it} + \beta_3(Kredit)_{it} + \beta_4(BPR)_{it} + e_t$$

Keterangan:

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (miliar rupiah)
Aset = Aset BPR (miliar rupiah)
DPK = Dana Pihak Ketiga BPR (miliar rupiah)
Kredit = Kredit yang disalurkan BPR (miliar rupiah)
BPR = Jumlah BPR Berbadan Hukum (unit)
e_t = *Error term*
it = Provinsi ke-i dan periode waktu/tahun ke-t

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sektor keuangan merupakan sektor yang paling banyak diregulasi karena dianggap sebagai sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian. Sektor finansial digerakan oleh dua lembaga keuangan yaitu lembaga perbankan yang terdiri dari bank-bank umum dan lembaga keuangan non – bank yang terdiri dari pasar modal, lembaga pembiayaan, pegadaian, asuransi dan dana pensiun. Sektor keuangan yang berkembang dengan baik, dapat mendorong kegiatan perekonomian dan sebaliknya, apabila tidak berkembang dengan baik akan menyebabkan perekonomian mengalami hambatan likuiditas dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam ruang lingkup kebijakan makroekonomi, sektor keuangan menjadi alat transmisi kebijakan moneter.

Sektor keuangan memegang peranan yang sangat signifikan dalam memicu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sektor keuangan menjadi lokomotif pertumbuhan sektor riil melalui akumulasi kapital dan inovasi teknologi. Lebih tepatnya, sektor keuangan mampu memobilisasi tabungan. Mereka menyediakan para peminjam berbagai instrumen keuangan dengan kualitas tinggi dan resiko rendah. Hal ini akan menambah investasi dan akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam ruang lingkup kebijakan makroekonomi, sektor keuangan menjadi alat transmisi kebijakan moneter. Dengan demikian, *shock* yang dialami sektor keuangan juga mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter.

Sektor keuangan yang mencakup perbankan merupakan sektor yang memegang peran cukup penting dalam menggerakkan pembangunan ekonomi suatu Negara. Hal ini dikarenakan kemampuan sektor keuangan memobilisasi modal dari pihak yang surplus dana, untuk diinvetasikan ke berbagai sektor ekonomi yang membutuhkan pembiayaan. Ketika sektor keuangan tumbuh secara baik, akan semakin banyak sumber pembiayaan yang dapat dialokasi kepada sektor produktif/sektor riil. Peningkatan pembiayaan sektor produktif akan menambah pembangunan fisik modal yang nantinya akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Beberapa indikator yang perlu menjadi perhatian diantaranya ukuran aset lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan dana pensiun yang masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan regional. Selain itu, ukuran dan cakupan produk keuangan seperti penyaluran kredit perbankan, penerbitan obligasi bagi sektor riil, maupun penerbitan saham yang juga masih relatif rendah. Diperlukan upaya bersama baik pemerintah, BUMN maupun pihak swasta untuk terus mengembangkan alternatif sumber-sumber pembiayaan dalam rangka mendukung tercapainya sasaran-sasaran pembangunan nasional.

Ada beberapa faktor yang menghambat akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu dari sisi permintaan dan dari sisi penawaran. Dari sisi permintaan, akses masyarakat menjadi terhambat karena kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap jasa keuangan, rendahnya pendapatan, tidak adanya jaminan dan sosial inklusif.

Dari sisi penawaran, beberapa faktor yang seringkali membuat masyarakat tidak dapat mengakses sektor keuangan formal diantaranya jauhnya jarak cabang bank dengan tempat tinggal, prosedur yang rumit, ketidaksesuaian produk keuangan dengan kebutuhan, bahasa yang kurang dimengerti, perilaku pegawai, dan waktu operasi dari bank yang kaku. Mencermati perkembangan perekonomian terkini serta prospek perekonomian ke depan, tantangan pembangunan yang akan dihadapi Indonesia akan semakin kompleks.

Beberapa isu strategis yang perlu mendapat penanganan serius dalam melaksanakan pembangunan diantaranya ialah menjaga stabilitas ekonomi makro antara lain ditempuh dengan menjaga keseimbangan penawaran dan permintaan untuk mendorong efisiensi ekonomi, mengendalikan inflasi dan stabilitas nilai tukar, menjaga iklim investasi yang kondusif, efisiensi sistem logistik, serta kebijakan moneter dan sektor keuangan. Keterbukaan perekonomian menyebabkan globalisasi di sektor keuangan menguat sehingga kebutuhan negara dalam mencukupi modalnya mendapat tambahan dengan adanya aliran dana masuk ke dalam negeri.

Suatu negara membutuhkan dana bagi pembangunan ekonomi dimana dana tidak dapat hanya diperoleh dari hasil pungutan wajib yang diadakan oleh pemerintah yaitu pajak namun membutuhkan dari sumber lainnya. Perbankan sebagai industri yang mengelola dana masyarakat menjadi salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan dengan menghimpun dana dan menyalurkannya kembali berupa pinjaman. Kondisi perbankan yang memburuk maka akan mengakibatkan kontraksi yang substansial dan menghambat pemberian pinjaman. Hambatan tersebut mengakibatkan penurunan pendanaan investasi yang akan memperlambat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Secara konsepsional, pentingnya stabilitas sistem keuangan dalam perekonomian didorong oleh empat hal, antara lain pertumbuhan sektor keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan sektor riil, integrasi sistem keuangan global dan regional, kompleksitas sistem keuangan dan perubahan komposisi dalam proses sistem keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dimana komposisi aset non moneter menjadi lebih penting (Houben *et al* 2004). Dalam sejarah sektor keuangan di Indonesia, sistem keuangan mengalami perubahan dan perkembangan yang fundamental terutama setelah memasuki era deregulasi pada akhir dekade 1980-an yang kemudian diterbitkannya beberapa undang-undang di bidang keuangan dan perbankan. Perkembangan perbankan di Indonesia di mulai pada tahun 1988 dengan adanya paket deregulasi tertanggal 27 Oktober 1988 yaitu berupa relaksasi ketentuan permodalan untuk pendirian bank baru telah menyebabkan munculnya sejumlah bank umum berskala kecil dan menengah dan pada puncaknya jumlah bank umum bertambah dari yang semula 111 bank menjadi 240 bank pada tahun 1994-1995, sementara jumlah BPR meningkat signifikan dari 8.041 pada tahun 1988 menjadi 9.310 pada tahun 1996 (Priyarsono *et al* 2011).

Pertumbuhan pesat yang terjadi pada periode 1988 hingga 1996 berbalik arah ketika memasuki periode 1997-1998 karena terjadi krisis keuangan dan perbankan. Periode 1999-2002 krisis perbankan yang demikian parah pada kurun waktu 1997-1998 memaksa pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Berdasarkan fakta dan semakin jelasnya arah kebijakan yang direncanakan pemerintah dalam masa pemulihan krisis 1997-1998, maka pemerintah dan utamanya Bank Indonesia sejak awal tahun 2004 memperkenalkan kepada publik dan kepada pelaku di sektor perbankan bahwa dilaksanakan kebijakan pengembangan sistem perbankan Indonesia secara profesional melalui penerapan strategi yang disebut *Arsitektur Perbankan Indonesia* (API). Strategi ini dimaksudkan agar sektor perbankan dapat menjadi pilar utama sumber pembiayaan sektor riil, menjadi sektor ekonomi yang sehat, kuat, efisien, dan dipercaya oleh masyarakat domestik maupun internasional untuk mendukung peningkatan kinerja perbankan dalam perekonomian. Peranan sektor keuangan terhadap pembangunan ekonomi teraliansi dengan dana yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan bagi pembangunan pada seluruh sektor pembangunan negeri (Levine *et al* 2000).

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan seluruh instansi yang terkait secara berkelanjutan maka akan memberikan nilai peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini performa perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat dari besar kecilnya pemberian kredit terhadap sektor riil. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi salah satunya didukung oleh sektor keuangan baik perbankan maupun non-bank. Pembangunan sektor perbankan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Cheng dan Degryse 2006). Sektor perbankan merupakan lembaga intermediasi antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal. Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik dapat meningkatkan keadaan konsumen yang memungkinkan untuk melakukan pembelian lebih baik. Sejak terjadinya kriris keuangan yang menyerang fundamental ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 sektor keuangan mengalami *shock* sehingga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi yang melambat pada saat itu (Johnston dan

Morduch 2008). Perbankan tidak mampu menjadi penopang kegiatan ekonomi. Berbagai kebijakan kemudian muncul yang merupakan dampak dari krisis keuangan dengan paket-paket kebijakan keuangan dan momentumnya pada tahun 2004 merupakan awal terjadinya konsolidasi perbankan di Indonesia (Priyarsono 2011).

Perbankan sebagai lembaga penghimpun dan pembagi dana kepada masyarakat bertindak sebagai penggerak dalam perekonomian, menghimpun dana masyarakat tidaklah mudah sebab tersebar luasnya keberadaan masyarakat diikuti oleh letak geografis yang luas di Indonesia menjadi salah satu kendala. Sektor keuangan sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Guna meningkatkan peran sektor keuangan agar mencapai kondisi tersebut dibutuhkan upaya strategis yang meliputi suatu rencana dan implementasi dari kebijakan untuk mengintensifkan tingkat moneterisasi perekonomian melalui peningkatan akses terhadap institusi finansial.

Banyak penelitian empiris menunjukkan hubungan yang signifikan antara penguatan sektor keuangan khususnya keuangan formal dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kesejahteraan. Di samping itu, sistem keuangan yang inklusif berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan mengurangi perbedaan pendapatan. Mobilisasi yang efektif dari tabungan dalam negeri untuk investasi swasta memainkan peran kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Oleh karena itu sebuah sistem keuangan yang efisien dan inklusif akan memberdayakan individu, memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, mengintegrasikan masyarakat dengan perekonomian serta memberi perlindungan terhadap guncangan ekonomi. Beberapa penelitian lain juga menekankan pentingnya keterkaitan antara penguatan sektor keuangan dan penurunan kemiskinan, pengembangan sektor keuangan berpengaruh positif pada GDP per kapita melalui alokasi dana yang efisien dan meningkatkan output per pekerja serta dapat mengundang masuknya modal asing. Hal ini mengingat bahwa sistem keuangan dapat menurunkan biaya informasi dan biaya transaksi, meningkatkan alokasi modal dan likuiditas aset, dan dapat mendorong investasi pada kegiatan yang memiliki nilai tambah tinggi (Levine 1997).

Oleh karena itu, keuangan inklusif melalui akses ke layanan keuangan diantaranya kredit akan sangat membantu kelompok marjinal dan berpendapatan rendah untuk meningkatkan pendapatannya, mengakumulasi kekayaan, mengelola risiko, serta melakukan upaya untuk keluar dari kemiskinan. Dengan demikian, pasar keuangan akan menjadi jantung bagi perekonomian yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dengan memobilisasi tabungan, menyediakan kredit untuk bisnis, dan akselerasi dunia usaha dengan menyediakan fasilitas transfer dan pembayaran. Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang menguasai industri keuangan Indonesia. Perbankan memiliki aset terbesar dibandingkan dengan lembaga keuangan yang ada di industri keuangan Indonesia. Besarnya aset perbankan menunjukkan perbankan merupakan lembaga keuangan yang mampu menarik konsumen lebih banyak dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Masyarakat lebih memilih menyimpan asetnya di perbankan dalam bentuk DPK.

Peranan sistem keuangan menjadi relatif penting dalam suatu perekonomian negara di era globalisasi dewasa ini. Sektor keuangan dengan beragam produk-produk derivatifnya telah menjadi media penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat yang semakin massif, sehingga seringkali perputaran dalam sistem keuangan mengakibatkan biaya transaksi yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan adanya *asymmetric information* yang dapat menimbulkan *adverse selection* dan *moral hazard* yang akhirnya akan menyebabkan inefisiensi (Schumpeter 1934; Levine (1997, 2000)). Lucas (1988) bahwa dalam kegiatan transaksi ekonomi tidak menyinggung peran sektor keuangan di dalamnya. Seiring dengan fluktuasi ekonomi yang dinamis, perbankan menjadi sektor dominan pada sistem keuangan yang akan meningkatkan tabungan dan mengakomodir pendanaan untuk investasi sehingga meningkatkan produktivitas modal dan mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai akibat adanya intermediasi keuangan (Fritzer 2004; Kularatne 2002).

Peran sektor keuangan dalam negeri diharapkan dapat menjadi *counter part* pemerintah dalam upaya mendorong pembangunan dan perbaikan sisi penawaran dalam negeri. Namun demikian, kinerja sektor keuangan swasta saat ini, khususnya sektor perbankan, juga masih menghadapi kendala. Keterbatasan dukungan sektor perbankan sebagai sektor terbesar antara lain disebabkan oleh keterbatasan sumber

pendanaan domestik. Pada saat daya dukung perbankan telah mencapai batas kemampuannya sebagaimana tercermin pada tingkat *Loan to Deposit Ratio* (LDR), sementara indikator rasio simpanan terhadap PDB Indonesia relatif rendah dibandingkan negara-negara tetangga (Kemenkeu 2017). Peran sektor keuangan pelaku usaha di daerah pedesaan tampak *holistic equal* dan bersaing. OJK dapat menstimulasi sumber pembiayaan dengan cara kondusif dalam pengembangan usaha yang meningkatkan berbagai produksi baik untuk lokal maupun ekspor.

Peran sektor keuangan dapat merealisasi perkembangan produksi dan akan mencerminkan perkembangan kegiatan perekonomian daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya peningkatan peran sektor keuangan domestik dalam membiayai investasi perekonomian masih menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian Indonesia. Belum optimalnya peran sektor keuangan domestik serta tingginya ketergantungan terhadap pendanaan dari luar negeri dapat mengakibatkan rentannya perekonomian domestik terhadap gejolak eksternal. Saat ini, masih terdapat potensi pengembangan sektor keuangan, baik dari segi fungsi intermediasi oleh perbankan, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), maupun pasar modal.

Pemerintah tengah berupaya untuk merancang dan menciptakan konsep yang lebih luas yang berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan seluruh segmen masyarakat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Inklusifitas pertumbuhan ekonomi justru menjadi kebijakan yang sangat penting untuk mengurangi kemiskinan. Untuk mencapai tujuan ini, banyak negara berkembang termasuk Indonesia serius untuk mengembangkan sektor keuangan sebagai inti dari agenda pembangunan (Bank Indonesia 2014). Oleh karenanya menjadi penting untuk mengembangkan kebijakan sektor keuangan yang *pro* masyarakat miskin (*pro-poor*) dengan menghilangkan hambatan bagi siapa saja yang ingin mengakses sistem keuangan melalui penghapusan hambatan harga maupun non-harga (Demirgüç-Kunt *et al* 2008).

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara berkembang telah meningkatkan pendapatan per kapita, namun pada sisi lainnya juga meningkatkan ketidakmerataan dalam ekonomi. Sektor keuangan berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Namun berdasarkan hasil temuan empiris, ketidakmerataan juga terus meningkat dengan adanya pembangunan keuangan. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa daerah dengan akses keuangan yang tinggi memiliki tingkat ketidakmerataan yang lebih rendah akibat pembangunan keuangan. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem keuangan yang bersifat inklusif sehingga seluruh kelompok masyarakat mendapatkan manfaat dari jasa keuangan.

Demirguc-Kunt *et al* (2008) menyatakan bahwa sektor keuangan merupakan inti dari proses pembangunan. Levine (1997) meneliti berdasarkan analisis empiris baik pada tingkat perusahaan, industri, rumah tangga, maupun perbandingan antar negara, bahwa terdapat hubungan positif antara fungsi sistem keuangan dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Pembangunan sektor keuangan, terutama sektor perbankan, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Cheng dan Degryse 2006). Sektor perbankan juga menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional dan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi. Bank merupakan lembaga perantara keuangan yang dapat menghubungkan pihak yang memiliki modal dengan pihak yang membutuhkan modal. Fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan dapat mengurangi biaya transaksi, pembagian risiko, dan informasi asimetris Perantara keuangan memiliki peranan penting dalam meningkatkan efisiensi ekonomi karena membantu pasar keuangan menyalurkan dana kepada pihak yang mempunyai peluang investasi yang produktif.

Sektor keuangan sendiri memegang peranan yang sangat penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Menurut Bank Dunia, sektor keuangan yang semakin berkembang diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan meredam volatilitas ekonomi makro. Namun rekomendasi tersebut masih menimbulkan perdebatan baik secara teori maupun secara empiris. Ada dua hal pokok yang masih diperdebatkan terkait perkembangan sektor keuangan, pertumbuhan ekonomi dan volatilitas ekonomi makro.

Pertama, perdebatan mengenai apakah perkembangan sektor keuangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi (*finance – led growth*) atau pertumbuhan ekonomi yang mendorong perkembangan sektor keuangan

(*growth – led finance*) (Levine 1997). *Kedua*, perdebatan mengenai hubungan antara perkembangan sektor keuangan dan volatilitas ekonomi makro. Perdebatan kedua terfokus pada permasalahan apakah sektor keuangan yang semakin berkembang akan menyebabkan volatilitas ekonomi makro. Tujuan kebijakan ekonomi makro adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan, tingkat pengangguran yang rendah, fluktuasi pertumbuhan ekonomi dan pengangguran yang rendah (meredam siklus bisnis), dan tingkat inflasi yang rendah. Tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai melalui berbagai kebijakan Bank Dunia yang menekankan pentingnya sektor keuangan untuk mencapai tujuan tersebut karena sektor keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan meredam volatilitas ekonomi makro. Oleh karena itu, Bank Dunia menyarankan pentingnya kebijakan yang mendorong perkembangan sektor keuangan di berbagai negara di dunia.

Atas dasar itu semua, pengembangan sistem keuangan yang mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dan memiliki ketahanan yang tinggi merupakan langkah yang sangat strategis dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi Indonesia dan menjaga kestabilan makroekonomi. Berkaitan dengan itu, salah satu aspek yang sering diperdebatkan di dalam pengembangan sistem keuangan adalah menurut teori *endogenous growth* (Solow), pertumbuhan ekonomi atau output di dorong oleh *physical* maupun *human capital* yang diakselerasi oleh variabel produktitas. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara.

Pembangunan ekonomi mengandung arti yang lebih luas dan mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Terdapat dua kemungkinan hubungan kausalitas antara pembangunan sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi, yaitu: *pertama*, *demand-following*, bahwa rendahnya pertumbuhan sektor keuangan adalah manifestasi kurangnya permintaan akan jasa finansial. *Kedua*, *supply-leading*, bahwa sektor keuangan mendahului dan mendorong pertumbuhan sektor riil. *Demand-following* adalah fenomena ketika pembentukan institusi finansial modern, aset dan liabilitas, dan berbagai jasa keuangan adalah sebagai respon dari meningkatnya permintaan jasa keuangan oleh para investor dan penabung dalam sektor riil. Pada saat perekonomian riil tumbuh maka permintaan akan jasa keuangan juga akan bertambah, dengan semakin banyaknya jasa keuangan yang digunakan maka perkembangan sektor keuangan juga akan menjadi positif.

Supply-leading hypothesis berarti bahwa pembangunan institusi dan pasar keuangan akan meningkatkan penawaran jasa keuangan (terutama permintaan jasa oleh para pengusaha dan investor) yang akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi riil. *Supply-leading* mempunyai dua fungsi, yaitu untuk mentransfer sumberdaya dari sektor tradisional menuju sektor industri, dan untuk mendorong respon para pengusaha dalam sektor industri. Lembaga intermediasi yang mentransfer sumberdaya dari sektor tradisional (melalui peningkatan kesejahteraan dan tabungan dari sektor ini untuk dijadikan deposito atau dengan penciptaan kredit) sesuai dengan konsep Schumpeter tentang inovasi keuangan (Maski 2010).

Berikut merupakan hasil perhitungan pengaruh indikator sektor keuangan yaitu aset BPR, kredit BPR, DPK BPR dan jumlah BPR terhadap PDRB :

$$\ln PDRB = 3.338824 + 0.086264 \ln ASET + 0.084359 \ln KREDIT + 0.086383 \ln DPK + 0.156335 \ln BPR$$

Hasil estimasi model *Principal Component Analysis* terlihat menunjukkan bahwa semua variabel bebas yakni aset, kredit, DPK dan jumlah BPR berbadan hukum berpengaruh secara positif dan signifikan sebesar 69,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi regional di wilayah Sulawesi yaitu PDRB. Hal ini diperkuat oleh

beberapa informasi dan data pendukung terkait hubungan positif antara aset, kredit, DPK dan jumlah BPR terhadap perekonomian regional di wilayah Sulawesi.

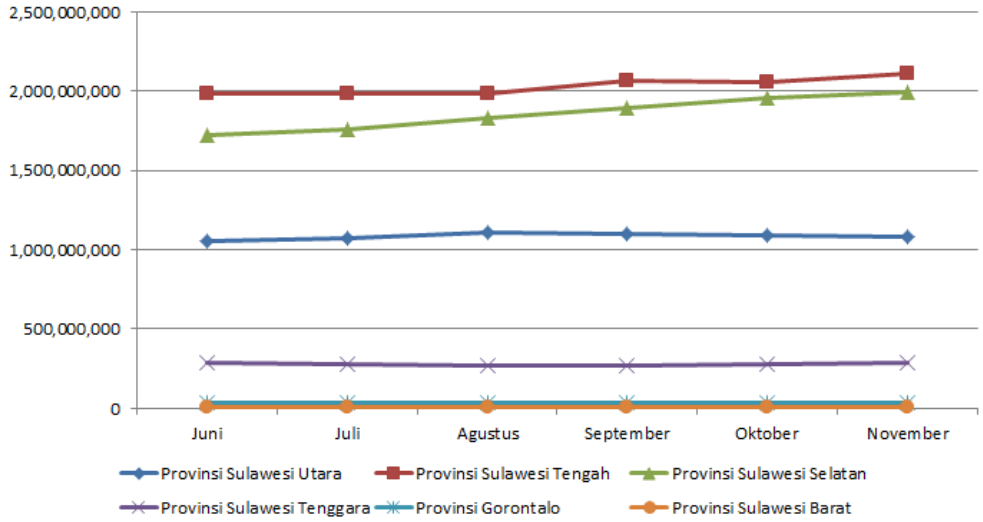

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Aset BPR Wilayah Sulawesi Periode Juni – November 2016
Sumber: Statistik BPR Konvesional, Bank Indonesia

Gambar 1 Menunjukkan bahwa jumlah aset BPR di wilayah Sulawesi didominasi oleh Provinsi Sulawesi Tengah dengan tren yang meningkat diikuti oleh Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Utara. Berkenaan dengan hal tersebut berdasar Gambar 2 dijelaskan bahwa ketiga provinsi di wilayah Sulawesi ini memiliki total aset terbesar bila diurutkan berdasarkan peringkat BPR berdasar total aset secara nasional. Tampak bahwa Provinsi Sulawesi Tengah memiliki total aset BPR terbesar.

Perkembangan kredit BPR juga didominasi oleh Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Utara dengan tren yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran kredit BPR di ketiga provinsi ini cukup potensial untuk terus dioptimalkan (Gambar 2).

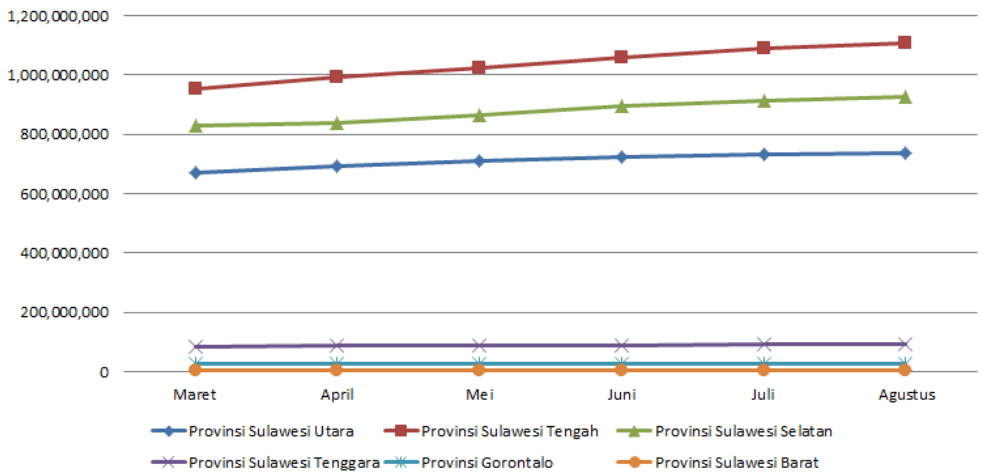

Gambar 2 Perkembangan Kredit BPR Konvensional Wilayah Sulawesi Periode Maret – Agustus 2013
Sumber: Statistik BPR Konvesional, Bank Indonesia

DPK BPR di wilayah Sulawesi didominasi oleh Deposito yang merupakan simpanan jangka panjang serta bentuk investasi (Gambar 3). Simpanan dalam bentuk tabungan tidak begitu besar jumlahnya. Provinsi Sulawesi Selatan mendominasi DPK BPR terbesar, disusul oleh Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah.

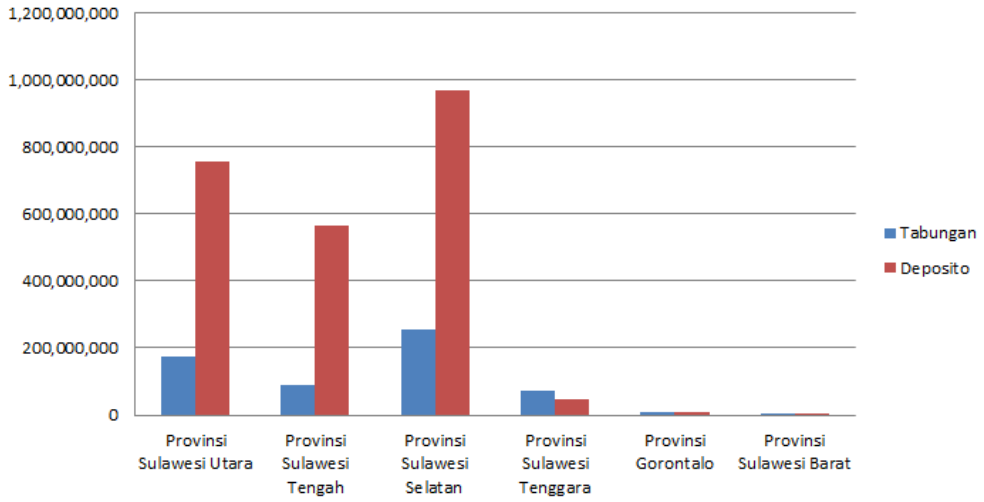

Gambar 3. DPK BPR Konvensional Wilayah Sulawesi Periode November 2016
Sumber: Statistik BPR Konvesional, Bank Indonesia

Jumlah BPR berbadan hukum berpengaruh positif terhadap perekonomian regional wilayah Sulawesi. Hal ini tentunya mendukung program pemerintah dalam melakukan tranformasi beberapa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang memenuhi kriteria untuk menjadi BPR. Gambar 4 menjelaskan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan mendominasi jumlah BPR berbadan hukum sebanyak 22 unit dan memiliki badan hukum BPR terlengkap yaitu PT, PD dan Koperasi. Disusul oleh Provinsi Sulawesi Utara (terbanyak PT) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (terbanyak PD).

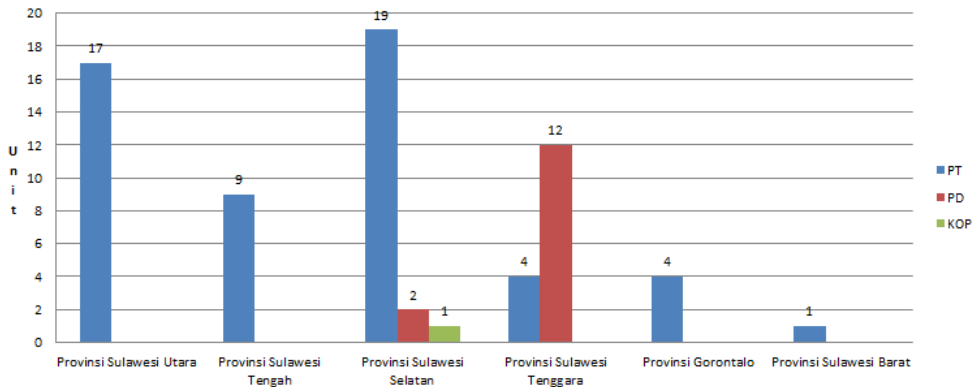

Gambar 4. Jumlah BPR Konvensional Berdasarkan Badan Hukum Wilayah Sulawesi Periode November 2016
Sumber: Statistik BPR Konvesional, Bank Indonesia

Berdasarkan Gambar 5 Terlihat bahwa jumlah BPR berdasarkan kantor wilayah didominasi oleh Provinsi Sulawesi Utara dengan jumlah kantor cabang terbanyak. Disusul oleh Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah kantor pusat terbanyak. Setiap provinsi di wilayah Sulawesi telah memiliki perwakilan kantor wilayah berupa kantor pusat dan kantor cabang BPR.

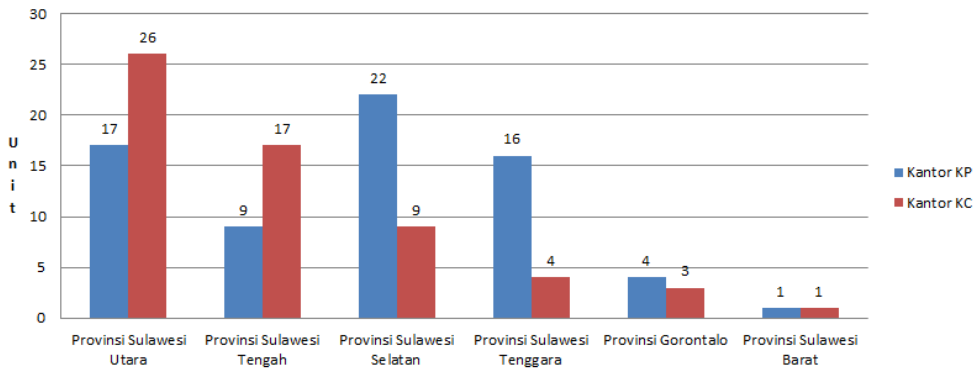

Gambar 5. Jumlah BPR Konvensional Berdasarkan Kantor Wilayah Sulawesi Periode November 2016
Sumber: Statistik BPR Konvesional, Bank Indonesia

Berdasarkan data, aset BPR di Sulawesi Utara mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 2,35 persen (yoy). Peningkatan tersebut ditopang oleh pertumbuhan DPK yang meningkat sebesar 5,58 persen (yoy). Peningkatan DPK didorong oleh peningkatan DPK jenis deposito yang meningkat sebesar 8,18 persen (yoy). Masih positifnya pertumbuhan DPK BPR dibanding bank umum merupakan akibat dari suku bunga simpanan BPR yang relatif lebih menarik. Sedangkan kredit BPR di Provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan sejak triwulan II tahun 2014. Selain itu perkembangan jumlah bank dan kantor bank BPR di Sulawesi Utara dapat dirinci masing-masing yaitu berjumlah 18 BPR dan 55 kantor BPR pada tahun 2014. Gambar 6 menjelaskan diantaranya pinjaman BPR di Provinsi Sulawesi Utara yang terus meningkat.

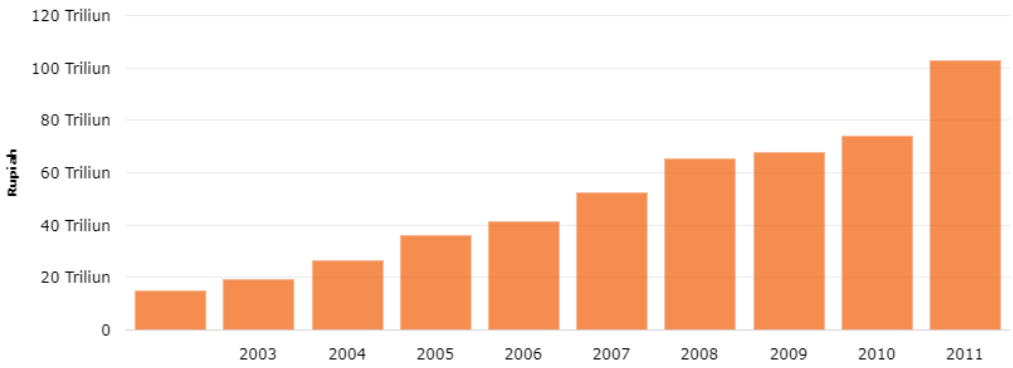

Gambar 6. Pinjaman Bank Umum dan BPR dengan Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Sulawesi Utara
Sumber: BI (2012)

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki aset BPR yang mengalami peningkatan sebesar 4.06 persen (yoy) menjadi 14,99 persen (yoy) pada triwulan IV 2014. Sedangkan pada sisi penyaluran dana, kredit BPR di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kontraksi dari 16,31 persen (yoy) menjadi 6,08 persen (yoy). Dari sisi kelembagaan, pada triwulan IV 2014, jumlah BPR tercatat masih tetap sama seperti periode sebelumnya yaitu sebanyak 29 BPR (Gambar 7).

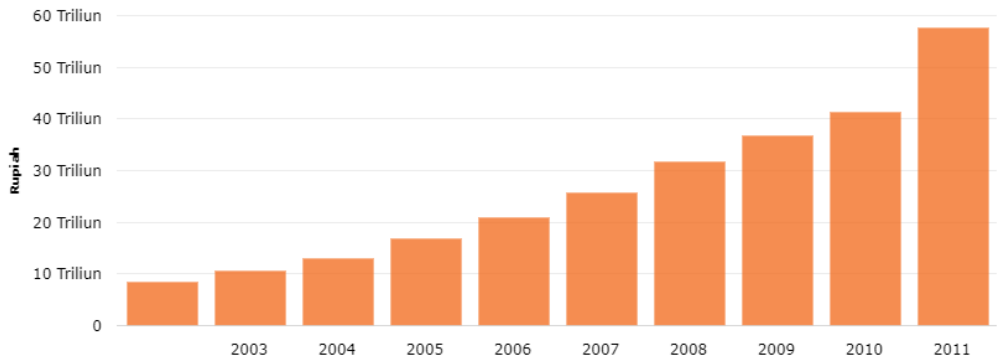

Gambar 7. Pinjaman Bank Umum dan BPR dengan Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Sulawesi Selatan
Sumber: BI (2012)

Jumlah aset BPR di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp 1,49 triliun atau memiliki pangsa sebesar 6,43 persen terhadap total aset perbankan di Provinsi Sulawesi tengah. Beberapa indikator kinerja BPR lainnya juga menunjukkan perbaikan dari kondisi sebelumnya. Secara tahunan aset seluruh BPR di Provinsi Sulawesi Tengah tumbuh 8,09 persen (yoy). Pertumbuhan aset didorong oleh pertumbuhan kredit sebesar 11,87 persen (yoy) dan DPK sebesar 13,29 persen (yoy). Jumlah DPK yang berhasil dihimpun BPR di Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan IV tahun 2014 ialah sebesar Rp 376 miliar atau naik 13,29 persen (yoy) dalam satu tahun terakhir. Komposisi DPK tersebut masih didominasi oleh simpanan berbiaya tinggi (Deposito) dengan pangsa sebesar 83,31 persen, sementara simpanan dalam bentuk tabungan meiliki pangsa 16,68 persen. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat memilih BPR sebagai tempat untuk menyimpan dana karena bersedia memberikan imbal jasa yang tinggi. Sedangkan pada sisi aktiva jumlah kredit yang disalurkan BPR juga mengalami pertumbuhan positif. Hingga akhir triwulan IV tahun 2014, jumlah BPR tercatat berjumlah 9 BPR (Gambar 8).

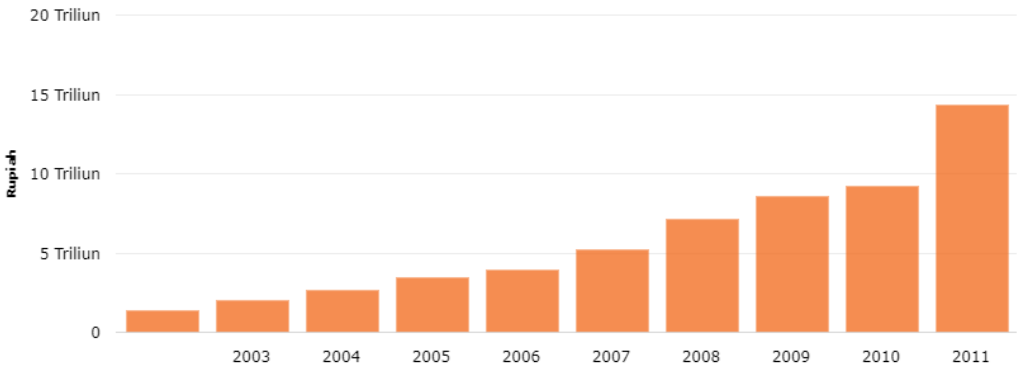

Gambar 8. Pinjaman Bank Umum dan BPR dengan Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Sulawesi Tengah,
Sumber: BI (2012)

Sektor jasa keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu sektor yang tercatat mengalami laju pertumbuhan tertinggi. Pada triwulan IV 2014 sektor keuangan tercatat tumbuh terakselerasi sebesar 12,22 persen (yoy) dibanding laju pertumbuhan di triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,39 persen (yoy). Meski di triwulan IV tercatat tumbuh terakselerasi, namun secara keseluruhan tahun 2014 sektor jasa keuangan justru tercatat tumbuh melambat sebesar 9,44 persen (yoy). Perlambatan kinerja yang terjadi di sektor keuangan diperkirakan diantaranya didorong oleh melemahnya kinerja sektor perbankan di Sulawesi

Tenggara sebagai bentuk dampak tidak langsung atas perkembangan kinerja sektor tambang. Kinerja intermediasi perbankan di Sulawesi Tenggara mengalami perlambatan. Melambatnya kinerja sektor perbankan terlihat dari perlambatan penyaluran kredit maupun penghimpunan dana dari masyarakat (Gambar 9).

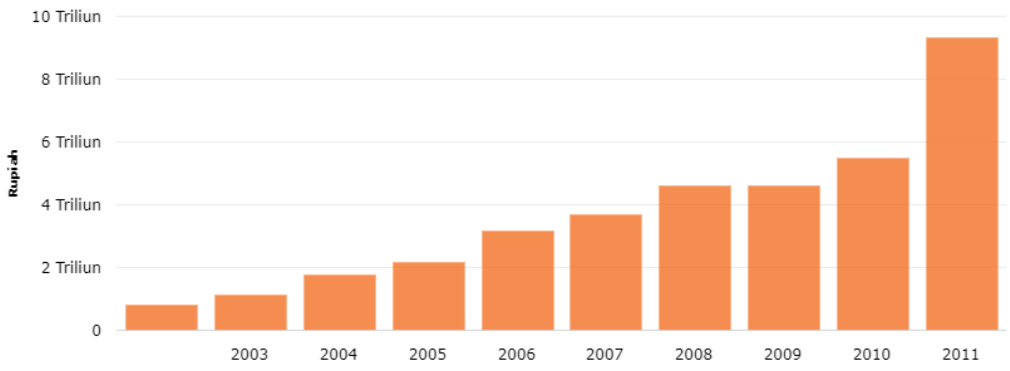

Gambar 9. Pinjaman Bank Umum dan BPR dengan Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Sulawesi Tenggara
Sumber: BI (2012)

Perkembangan kinerja investasi di Provinsi Gorontalo tidak terlepas dari peranan perbankan dalam penyaluran kredit terutama peningkatan peran perbankan sebagai salah satu motor penggerak investasi di Gorontalo. Penyaluran pembiayaan atau kredit perbankan di Gorontalo pada triwulan IV 2014 mengalami perlambatan. Pembiayaan keuangan sektor korporasi melalui perbankan di Gorontalo cukup terjaga di tengah kondisi tekanan ekonomi dan kebijakan moneter ketat. DPK yang berhasil dihimpun oleh perbankan di Gorontalo sedikit menunjukkan peningkatan. Pada triwulan IV 2014, DPK yang terhimpun oleh perbankan di Gorontalo tercatat sebesar Rp 3,47 triliun atau tumbuh sebesar 13,13 persen (yoy) dan mengalami peningkatan. Peningkatan DPK pada triwulan IV 2014 didorong oleh peningkatan pada deposito dan giro yang disebabkan oleh meningkatnya suku bunga bank merespon adanya peningkatan BI Rate. Namun demikian, peningkatan penyaluran DPK perbankan di Gorontalo lebih rendah dari peningkatan penyaluran kredit perbankan yang berada di Gorontalo (Gambar 10).

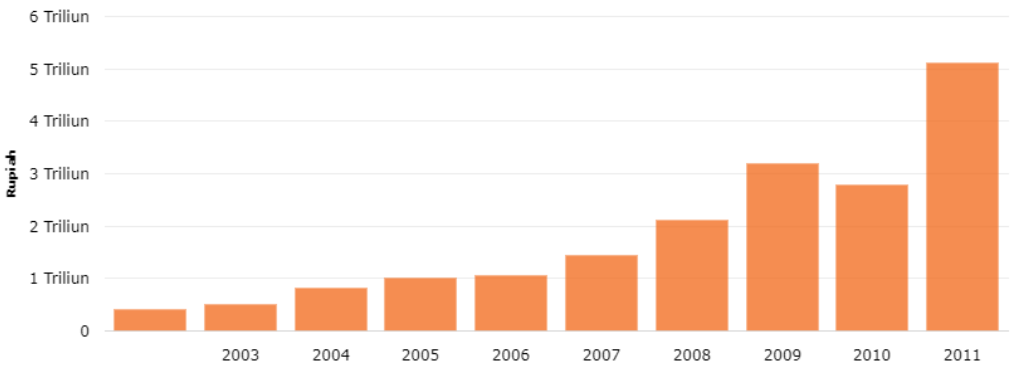

Gambar 10. Pinjaman Bank Umum dan BPR dengan Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Gorontalo
Sumber: BI (2012)

Berdasar intermediasi perbankan, pada triwulan III 2014, baik penghimpunan DPK maupun penyaluran kredit di Provinsi Sulawesi Barat mengalami perlambatan pertumbuhan. Melambatnya pertumbuhan seluruh jenis simpanan menyebabkan perlambatan kinerja DPK secara keseluruhan. Di triwulan III 2014, penyaluran

kredit korporasi di Sulawesi Barat tetap didominasi oleh sektor perdagangan. Kredit korporasi tercatat memiliki pangsa sangat rendah yaitu 1,69 persen terhadap total kredit produktif. Hal tersebut mengindikasikan perkembangan UMKM yang lebih dominan dalam menggunakan jasa keuangan perbankan di Sulawesi Barat. Dari aspek pertumbuhan, penyaluran kredit kepada sektor korporaso pada triwulan III 2014 mengalami perbaikan meski masih terkontraksi. Perbaikan ini terutama didorong oleh kinerja sektor perdagangan yang tumbuh signifikan pada triwulan laporan. Dari aspek kualitas, penyaluran kredit korporasi secara keseluruhan mengalami perbaikan kinerja. Berdasarkan sektor ekonomi, perlambatan kredit antara lain disumbangkan oleh melambatnya kinerja kredit lain-lain yang memiliki pangsa terbesar dalam total kredit di Provinsi Sulawesi Barat. Jumlah BPR di Provinsi Sulawesi Barat juga tercatat masih tetap sama seperti periode sebelumnya yaitu sebanyak 3 (tiga) BPR (Gambar 11).

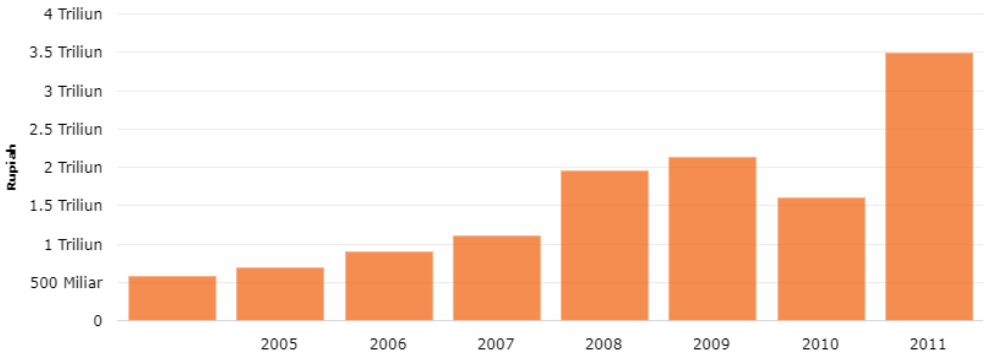

Gambar 11. Pinjaman Bank Umum dan BPR dengan Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Sulawesi Barat
Sumber: BI (2012)

Terkait dengan pengertian DPK maka simpanan masyarakat merupakan sumber dana bank, yang dimaksud dengan sumber dana bank adalah usaha bank dalam meghimpun dana untuk membiayai operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan. Simpanan masyarakat merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan sebuah bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Akan tetapi pencarian sumber dana dari sumber ini relatif mahal jika dibandingkan dana sendiri.

Salah satu kegiatan industri perbankan adalah pemberian kredit. Proporsi pendapatan terbesar bank berasal dari pendapatan bunga kredit yang disalurkan. Sedangkan jumlah kredit yang disalurkan tersebut didanai oleh beberapa sumber yaitu modal sendiri, pinjaman dari lembaga lain, dan pihak ketiga atau masyarakat. Selain itu, DPK memiliki kontribusi terbesar dari beberapa sumber dana tersebut sehingga jumlah DPK yang berhasil dihimpun oleh suatu bank akan mempengaruhi kemampuannya dalam menyalurkan kredit. Kredit diberikan kepada para debitur yang telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian yang dilakukan antara pihak debitur dengan pihak bank.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1998 dalam pasal 1, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan sangat penting.

Pembangunan sektor keuangan, terutama sektor perbankan, dapat meningkatkan akses dan penggunaan jasa perbankan oleh masyarakat. Semakin terbukanya akses terhadap jasa keuangan, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan akses tersebut serta meningkatkan pendapatannya melalui penyaluran kredit oleh lembaga keuangan terutama apabila digunakan untuk kegiatan produktif. Sulitnya akses terhadap jasa keuangan menyebabkan masyarakat miskin harus mengandalkan tabungan yang terbatas untuk investasi dan

pengusaha kecil harus mengandalkan laba untuk meneruskan usaha. Akibatnya, ketimpangan pendapatan tidak berkurang dan pertumbuhan ekonomi melambat.

Beberapa hasil penelitian telah menunjukkan bahwa pembangunan di sektor keuangan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan (Beck *et al* 2007; Shahbaz dan Islam 2011; Ang 2010) dan mengurangi kemiskinan (Jalilian dan Kirkpatrick 2002). Hasil penelitian Beck *et al* (2006) di 99 negara pada tahun 2003 – 2004 menunjukkan bahwa faktor yang menentukan jangkauan sektor keuangan sama dengan faktor yang menentukan kedalaman sektor keuangan. Faktor-faktor tersebut adalah tingkat dari pembangunan yang diproksikan dengan GDP per kapita, kualitas institusi yang diproksikan dengan *governance index*, serta informasi kredit yang diproksikan dengan *credit information index*. Van der Werff *et al* (2013), dalam penelitiannya di 31 negara OECD tahun 2011, menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi proporsi populasi yang mengakses perbankan adalah ketimpangan pendapatan, jumlah ATM dan bank per 100.000 populasi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

Kar dan Pentecost (2000) meneliti hubungan antara perkembangan sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Turki dengan menggunakan uji kausalitas Granger dalam kerangka analisis kointegrasi dan *Vector Error Correction Model* (VECM) selama periode tahun 1963-1995. Proksi dari perkembangan sektor keuangan yang digunakan adalah rasio monetisasi, rasio tabungan terhadap GDP, rasio kredit yang disalurkan kepada sektor swasta terhadap GDP, dan rasio kredit domestik terhadap GDP. Hasil penelitiannya terdapat hubungan kausalitas dua arah dalam jangka panjang dan jangka pendek antara perkembangan sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan kasualitas dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap rasio tabungan terhadap GDP dan rasio kredit domestik terhadap GDP, dan hanya mempunyai hubungan kausalitas dalam jangka panjang terhadap rasio kredit yang disalurkan kepada sektor swasta terhadap GDP.

Penelitian Hasiholan (2003) menganalisis kausalitas terhadap hubungan antara perkembangan sektor keuangan dengan pertumbuhan dan volatilitas ekonomi di Indonesia selama periode 1983.2-2000.4. Volatilitas ekonomi menggunakan standar-deviasi dari pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari model *Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity* (GARCH). Uji kausalitas dilakukan dengan menggunakan uji kausalitas Granger dalam kerangka analisis kointegrasi dan *Vector Error Correction Model* (VECM). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas Granger dua arah antara perkembangan sektor keuangan dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Serta hubungan kausalitas Granger dari perkembangan sektor keuangan ke arah volatilitas ekonomi dalam jangka pendek.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdurahman (2003) menguji kembali peran sektor perbankan sejak periode liberalisasi perbankan tahun 1983 hingga menjelang terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 dalam mendorong kinerja perekonomian Indonesia. Penelitiannya menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kredit yang disalurkan kepada sektor swasta berpengaruh signifikan terhadap GDP riil, berhasilnya reformasi keuangan sejak 1983 dibuktikan oleh peningkatan yang besar dalam rasio tabungan, kredit dan investasi terhadap GDP. Hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan sektor keuangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi (*supply-leading*).

Penelitian yang dilakukan Inggrid (2006) menganalisis pengaruh perkembangan sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama kurun waktu 1992:2-2004:4. Hasil uji kausalitas Granger menunjukkan kausalitas dua arah di antara pertumbuhan ekonomi dan *volume* kredit serta kausalitas satu arah yang berasal dari *spread* suku bunga menuju pertumbuhan ekonomi, maka sistem keuangan dapat menjadi mesin penggerak pertumbuhan di Indonesia. Analisis ekonometrika dengan *Vector Error Correction Model* (VECM) mendukung hipotesis signifikansi peranan sektor keuangan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, melalui kenaikan ketersediaan kredit, baik dari segi *volume* maupun harga. Secara spesifik, sektor keuangan berfungsi untuk memobilisasi tabungan, mengelola resiko, menurunkan biaya dalam memperoleh informasi mengenai proyek-proyek investasi yang potensial, melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek investasi, memonitor manajer dan mengerahkan kontrol bagi perusahaan, memperlancar transaksi dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Kemudian karena fungsi-fungsi dari sektor keuangan tersebut, maka akan

menyebabkan perkembangan sektor keuangan. Selanjutnya sektor keuangan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui saluran pertumbuhan. Saluran pertumbuhan ini terbagi dua yaitu akumulasi modal dan inovasi teknologi. Saluran pertumbuhan akumulasi modal dalam penelitian ini terbagi menjadi tabungan dan jumlah kredit yang disalurkan kepada pihak swasta. Saluran pertumbuhan akumulasi modal akan mempengaruhi motivasi masyarakat untuk menabung sehingga mempengaruhi tingkat tabungan yang akan mendorong investasi dan akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian melalui kredit swasta, maka penyaluran kredit ini merupakan aktivitas sektor keuangan yang sangat penting, yaitu dalam hal penyaluran dana dari masyarakat yang kelebihan dana kepada pihak investor yang kekurangan dana.

Salah satu penelitian yang mendukung bahwa pembangunan sektor perbankan dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan adalah pembangunan sektor keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dua jalur (Tiwari *et al* 2013). Pertama, kredit yang lebih murah membuat investasi semakin menarik, dimana pengusaha kecil memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Kemudahan akses terhadap modal bagi pengusaha dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan output, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Jalur kedua, meminjam dengan biaya rendah memberi keuantungan bagi masyarakat miskin untuk investasi pendidikan dan kesehatan. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan jalan keluar dari perangkap kemiskinan. Pembangunan sektor keuangan, terutama sektor perbankan, dapat meningkatkan akses dan penggunaan jasa perbankan oleh masyarakat. Semakin terbukanya akses terhadap jasa keuangan, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan akses tersebut serta meningkatkan pendapatannya melalui penyaluran kredit oleh lembaga keuangan terutama apabila digunakan untuk kegiatan produktif. Sulitnya akses terhadap jasa keuangan menyebabkan masyarakat miskin harus mengandalkan tabungan yang terbatas untuk investasi dan pengusaha kecil harus mengandalkan laba untuk meneruskan usaha. Akibatnya, ketimpangan pendapatan tidak berkurang dan pertumbuhan ekonomi melambat (Allen *et al* 2012).

Globalisasi di sektor keuangan dan perbankan akan memberikan manfaat berupa perbaikan kelembagaan dan peraturan maupun pengawasan yang mengarahkan penggunaan modal menjadi lebih produktif dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Beck *et al* (2007) telah meneliti penjangkauan sektor keuangan dan faktor-faktor dengan menggunakan data lintas negara. Bahkan, di negara maju juga, penelitian telah mengungkapkan bahwa pengecualian dari sistem keuangan terjadi untuk kelompok berpenghasilan rendah, etnis minoritas, imigran dan lain-lain (Barr 2004; Kempson dan Whyley 1998). Di negara-negara maju, sektor keuangan formal melayani sebagian besar penduduk, sedangkan segmen besar masyarakat, di negara-negara berkembang, terutama kelompok berpenghasilan rendah, memiliki akses yang sederhana untuk jasa keuangan, baik formal maupun informal dan pada negara-negara maju telah mengalami tingkat inklusi yang baik (Peachy dan Roe 2005).

Sebuah perluasan dari sektor keuangan akan berdampak positif terhadap perekonomian suatu negara. Arah kenaikan pertumbuhan diawali dengan pembangunan sektor keuangan sehingga Chakraborty (2007) dengan menggunakan tes *Augmented Dicky Fuller* (ADF) sebagai tes *Phillips Peron* melihat pembangunan finansial yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi dengan studi kasus India. Hasil dari penelitian tersebut adanya kausalitas dari tingkat pertumbuhan riil PDB pada kapitalisasi pasar saham yang memiliki implikasi bahwa pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan pembangunan keuangan di India namun koefisien tersebut diperkirakan kecil dan menunjukkan bahwa hubungan antara pembangunan keuangan dan pertumbuhan ekonomi terlihat lemah, kointegrasi menunjukkan hubungan negatif antara volatilitas harga saham dan tingkat pertumbuhan dari sektor industri.

Goyal *et.al* (2011) mengukur *Financial Deepening* dan stabilitas moneter internasional dengan menggunakan *Index of Financial Depth*. Penelitian ini menghasilkan bahwa *Financial Deepening* dapat memberi banyak manfaat bagi ekonomi yang menunjukkan bahwa pendalaman terkait dengan adanya insiden menjadi berkurang dan biaya yang lebih rendah dari krisis. Keadaan perekonomian yang tidak menentu menandai keberadaan sektor keuangan yang kurang baik dalam menjalankan fungsinya sebagai wadah dalam akses masyarakat ke keuangan. Hal ini sesuai dengan studi Mohan (2006) yang membuktikan bahwa sektor keuangan harus dijaga

dengan kebijakan ukuran yang tepat agar menjadi penyeimbang dalam perekonomian sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Banyak penelitian telah dilakukan terhadap ekonomi yang berbeda pada hubungan antara pembangunan keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian membuktikan bahwa sektor keuangan dalam memicu pertumbuhan ekonomi dan lain-lain menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi mengarah pada pengembangan sektor keuangan. Selain itu, penelitian lain menemukan bahwa hubungan antara perkembangan finansial dan pertumbuhan adalah dua arah, yaitu, sektor keuangan dalam memicu pertumbuhan dan sebaliknya. Hasil kombinasi yang didapatkan menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut yang akan dilakukan pada hubungan pertumbuhan keuangan menggunakan teknik penelitian yang lebih inovatif.

Adapun hubungan antara pembangunan keuangan dan pertumbuhan ekonomi dimana peran sektor keuangan menjadi penting karena perantara keuangan memfasilitasi alokasi sumber daya. Mengetahui bagaimana peranan sektor keuangan adalah suatu hal yang penting bagi pengambil keputusan. Jika sektor keuangan dianggap mempunyai pengaruh yang penting, maka pemerintah harus mempromosikan perkembangan sektor keuangan yang meliputi pengembangan sektor perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan pasar modal dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun jika sektor keuangan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi maka akan menyebabkan pemborosan sumber daya jika pemerintah menitikberatkan tujuan pada pengembangan sektor keuangan.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan yang dapat diperoleh dari hasil analisis pengaruh perkembangan sektor keuangan dari Bank Perkreditan Rakyat terhadap perekonomian regional di wilayah Sulawesi yaitu variabel sektor finansial/keuangan yang terdiri dari aset BPR, jumlah kredit yang disalurkan oleh BPR, DPK BPR dan jumlah BPR berbadan hukum masing-masing mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi regional di wilayah Sulawesi secara positif dan signifikan. Jumlah BPR berbadan hukum memiliki pengaruh yang paling signifikan sehingga kedepan penambahan jumlah BPR berbadan hukum perlu ditingkatkan.

Oleh karenanya sebagai masukan saran atau rekomendasi maka Pemerintah daerah, otoritas moneter dan OJK dalam pelaksanaannya perlu bersinergi dengan kementerian, perbankan, lembaga domestik guna meningkatkan peran sektor keuangan dari BPR diantaranya berkaitan dengan pembentukan akumulasi modal fisik dan pemeratan persebaran kredit BPR yang berdampak terhadap pembangunan kewilayahan di wilayah Sulawesi khususnya Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian khususnya terkait dengan substansi penelitian yaitu kepada para Promotor dan dosen pembimbing penelitian Disertasi yaitu Prof Dr Ir Bambang Juanda MS, Prof Dr Muhammad Firdaus SP MSi dan Dr Jaenal Effendi SAg MA. Serta seluruh civitas akademika Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. z

7. DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman. 2003. "The Role Of Financial Development In Promoting Economic Growth: Empirical Evidence Of Indonesian Economy". *Jurnal Keuangan dan Moneter*, 6: 84-96.

Allen F, Demirguc-Kunt A, Klapper L, Peria MSM. 2012. *The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts.* Development Research Group, Finance and Private Sector Development Team. World Bank : Working paper No 6290.

Arsyad L. 1999. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta (ID): Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN

Barr, M. 2004. "Banking the poor". In Yale Journal on Regulation 21 pp122-239.

Beck T, Demirguc-Kunt A, Levine R. 2007. *Finance, Inequality and the Poor*. J Econ Growth. 12:27-49.

Bank Indonesia. 2017. Statistik BPR Konvensional. Bank Indonesia

Bank Indonesia. 2016a. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Utara. Bank Indonesia

Bank Indonesia. 2016b. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan. Bank Indonesia

Bank Indonesia. 2016c. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Tengah. Bank Indonesia

Bank Indonesia. 2016d. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Tenggara. Bank Indonesia

Bank Indonesia. 2016e. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Gorontalo. Bank Indonesia

Bank Indonesia. 2016f. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Barat. Bank Indonesia

Boediono. 1996. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta (ID): Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) UGM

Chakraborty, i. 2007. Does financial development cause Economic growth? The case of india. Occasional paper. Institute of development studies kolkata.

Demirguc-Kunt A, Beck T, Honohan P. 2008. *Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access*. Washington, DC (US): World Bank.

Fritzer, Friedrich. 2004. "Financial Market Structure and Economic Growth: A Cross Country Perspective." Monetary Policy and The Economy 2nd Quarter, pp. 72-87.

Goyal, R. 2011. Financial deepening and international monetary stability. IMF Occasional Paper. International Monetary Fund.

Haryanto FR. 2007. Dampak Instrumen Kebijakan Moneter terhadap Perekonomian Indonesia: Suatu Analisis Jalur Mekanisme Transmisi Moneter [Disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor

Hasiholan, R. M. 2003. *Hubungan Antara Perkembangan Sektor Keuangan Dengan Pertumbuhan dan Volatilitas Ekonomi di Indonesia, 1983.2- 2000.4: Suatu Analisis Kausalitas* [tesis]. Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Houben, A., Kakes. J., and Schinasi. G. 2004. Towards a Framework for Safeguarding Financial Stability, IMF Occasional Paper (WP/04/101)

Inggrid. 2006. "Sektor Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Pendekatan Kausalitas dalam *Multivariate Vector Error Correction Model* (VECM)". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Fakultas Ekonomi UK Petra*, 8:40-50

Jalilian H, Kirckpatrick C. 2002. *Financial Development and Poverty Reduction in Developing*

Johnston. D. Jr., Morduch. J. 2008. International Bank for Reconstruction and Development. Oxford University. The World Bank Economic Review.

Juanda B. 2010. Ekonomi Eksperimental untuk Pengembangan Teori Ekonomi dan Pengkajian Suatu Kebijakan [Makalah]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor

Kar, M. dan E.J. Pentecost. 2000. "Financial Development and Economic Growth in Turkey: Further Evidence on the Causality Issue", *Economic Research Paper*, 00(27), Loughborough University.

[KEMENKEU]. Kementerian Keuangan. 2017. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2018

Kempson, E. and Whyley, C. 1998. Access to current accounts. London: British Bankers' Association.

Kularatne, C. 2002. "An Examination of the Impact of Financial Deepening on Long-Run Economic Growth : An Application of a VECM Structure to a Middle-Income Country Context.

Levine R. 1997. Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda. *Journal of Economic Literature*. 35, pp 688 – 726.

Lucas, R.E. 1988. On the Mechanism of Economic Development. Journal of Monetary Economics, 22 (1), 3-42.

Maski G. 2010. Analisis Kausalitas antara Sektor Keuangan dan Pertumbuhan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Vol. 10 No.2, pp 143-158.

Mohan, R. 2006. Economic growth, financial deepening, and financial inclusion. RBI Bulletin.

Peachy, S dan A. Roe. 2005. *Access to Finance: Measuring the Contributions of Savings Banks.* Brussels: World Savings Banks Institute, September.

Priyarsono *et,al.* 2011. Struktur pasar persaingan perbankan Indonesia dalam periode konsolidasi. Jurnal Manajemen dan Agribisnis, Vol.8.No.2

Rustiadi E, Saefulhakim S, dan Panuju DR. 2011. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta (ID): Crespent Press dan Yayasan Obor Indonesia

Schumpeter J.A. 1934. "The Theory of Economic Development", Cambridge, MA, Harvard University Press.

Shahbaz M, Islam F. 2011. *Financial Development and Income Inequality in Pakistan: An Application of ARDL Approach*. Munich Personal RePEc Archive (MPRA). 17:13.

Sukirno S. 2006. Ekonomi Pembangunan. Jakarta (ID): Rajawali Press

Tarigan R. 2003. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta (ID): Penerbit Bumi Aksara

_____. 2006. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Jakarta (ID): Penerbit Bumi Aksara

Tiwari AK, Shahbaz M, Islam F. 2013. *Does financial development increase rural-urban income inequality? Cointegration analysis in the case of Indian economy*. Int J Soc. 40(2):151-168.

Van der Werff AD, Hogarth JM, Peach ND. 2013. *A Cross-Country Analysis of Financial Inclusion within the OECD*. zonsumer Interest Annual. Volume 59